

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) DI DESA PULAU SAPI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU

Fatah Dwi Priyono¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of the village movement program (Gerdema) in the Village Island Cow District Mentarang Malinau District. This research method using explorative method with inductive approach. To obtain data of the researcher using data source in the form of person, place, and paper. Data collection techniques that the author uses are observation, interviews, and documentation. To answer and express the problems to the phenomenon that occurs the researcher uses data analysis in the form of data reduction, data presentation, and data verification. The result of the research shows that the implementation of Gerdema program in Cow Village Village of Mentarang Sub-district is not yet fully effective. It can be seen from the effectiveness indicator that is obtained by the researcher that is the success of the program, the success of the target, the satisfaction of the program, the level of input and output, and the achievement of the objective still not enough.

Keywords: Effectiveness, Policy, Gerdema

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program gerakan desa membangun (Gerdema) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Metode penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan sumber data berupa person, place, dan paper. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjawab dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan terhadap fenomena yang terjadi peneliti menggunakan analisi data berupa data reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program Gerdema di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang masih belum sepenuhnya efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator efektifitas yang diperoleh oleh peneliti yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyuluruh masih kurang.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Gerdema

Pendahuluan

Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (Dana GERDEMA) adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Malinau. Sumber utama Dana GERDEMA adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil pertambangan batu bara, hasil perkebunan sawit dan karet, hasil pertanian, serta pendapatan lain daerah yang sah. Pola keuangan

Dana Gerdema dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD. Sumber utama sebagai kekuatan pengelolaan keuangan desa dan proses pelaksanaan APBDes ini berpedoman kepada Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sebelumnya telah direvisi merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki sumber anggaran dari Dana GERDEMA dialokasikan untuk membiayai berbagai pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana GERDEMA Merupakan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau dari kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Inovasi ini merupakan penyesuaian dengan visi misi, RPJM Kabupaten Malinau dan karakteristik yang dimiliki Kabupaten Malinau dimana sebagian besar wilayahnya merupakan pedesaan yang berjumlah 109 desa dari 15 Kecamatan.

Pelaksanaan Alokasi GERDEMA diharapkan akan mendorong berjalannya Pemerintahan Desa melalui fungsi manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan dan manajemen pelayanan publik secara konsisten; tumbuhnya dan dinamisnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemerintahan; tumbuh dan berkembangnya demokrasi di desa; tumbuh dan dinamisnya kepemimpinan di desa; terwujudnya transparansi/keterbukaan di desa; terwujudnya efisiensi dan efektivitas di desa; terbangunnya budaya swadaya di desa; tumbuhnya prinsip pemberdayaan di desa; serta terbangunnya budaya dan perilaku keberpihakan kepada masyarakat lemah.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Malinau, pada tahun anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) Kepada 109 desa yang ada guna mendukung APBDes. Dengan nilai tersebut, setiap desa memperoleh dana Gerdema sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Malinau meningkatkan Alokasi Dana GERDEMA menjadi sebesar Rp132.600.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah). Sedangkan pada tahun anggaran 2015 nilainya kembali meningkat menjadi Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah).

Dengan Alokasi Dana GERDEMA pembangunan fisik selama ini dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan fisik lebih di prioritaskan dibandingkan pembangunan pemberdayaan masyarakat sehingga pemanfaatan fasilitas baik prasarana maupun sarana yang ada di Desa tidak optimal.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik melakukan Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program gerakan desa membangun (GERDEMA) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

Konsep dan Teori

Efektivitas

Pandangan Sutrisno (2013:123) dalam penelitian mengenai efektivitas, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Steers dalam Sutrisno (2013:123) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan : (1) Optimalisasi tujuan-tujuan, (2) Perspektif Sistem dan (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam organisasi. Yang dimaksud optimalisasi tujuan adalah segala aktifitas atau tindakan yang dilakukan dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut, pencapaian tujuan akan efektif apabila sistem-sistem yang ada bekerja menggunakan kemampuan yang melibatkan segala sumber daya yang dimiliki. Perspektif sistem merupakan pandangan suatu organisasi terhadap lingkungan sekitarnya, lebih memperhatikan hubungan antara sistem-sistem yang saling ketergantungan antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Organisasi sebagai suatu sistem memiliki tiga komponen utama yaitu terdiri dari input, proses, dan output. Input dapat bersumber dari lingkungan sekitar organisasi dan kemudian di proses untuk menghasilkan output yang diberikan kembali kepada lingkungannya. Perilaku manusia sangat menentukan apakah organisasi itu efektif atau tidak, tanpa manusia suatu organisasi tidak akan berjalan. Perilaku manusia dapat berupa kompetensi, kinerja dan kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk pekerjaan dalam sistem-sistem suatu organisasi.

Pramutadi dalam Amin (2012:50) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil dan tujuan, serta menunjukkan derajat kesesuaian antara yang dinyatakan sebagai tujuan dengan hasil yang dicapai”. Efektivitas merupakan suatu hasil yang mempunyai kesesuaian dengan tujuan-tujuan bersama yang sebelumnya telah ditetapkan.

Pembangunan

Makmur (2009:253) mengatakan “Pembangunan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, organisasi, pemerintah, negara dan bangsa dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan kedinamisan yang dapat menciptakan kestabilan dalam berusaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya”.

Proses pembangunan meliputi beberapa komponen sebagai perubahan sosial yang terencana dengan baik tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan ekonomi, terdapat aspek yang belum diketahui dari kehidupan suatu masyarakat seperti gaya hidup, persepsi, motivasi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Siagian (2012:4-5) menyatakan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang

ditempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Desa

Siagian dalam Suharto (2016:66) menyebutkan “Desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan”. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:4) mengartikan desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah orang yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mata pencahariannya adalah bertani dan nelayan.

Menurut Widjaja dalam Effendy (2008:27), Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa atau marga merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa atau marga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pengertian Alokasi Dana Gerdema

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka adanya alokasi dana gerakan desa membangun yang selanjutnya disebut dana Gerdema adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang sah.

Sasaran dan Organisasi Pengelola Alokasi Dana Gerdema

Sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012, sasaran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun yaitu “untuk peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima serta menunjang penguatan fungsi dan peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Sedangkan organisasi pengelola berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Malinau adalah unsur utama yang harus proaktif dalam penyaluran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.

2. Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan adalah unsur perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang juga mempunyai kewajiban yang sama dalam memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.

3. Desa.

Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan sumber data berupa *person, place, dan paper*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjawab dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan terhadap fenomena yang terjadi peneliti menggunakan analisis data berupa data reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Pola berpikir penelitian kualitatif adalah induktif, menurut Komara (2011:76) Pendekatan Induktif adalah menangkap, mengamati dan mengobservasi dari suatu fakta dari fenomena yang dikumpulkan untuk kemudian diamati, diklarifikasi, dan disusun secara sistematis kemudian dibuat generalisasi sebagai kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Efektifitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema)

Alokasi Gerdema sangat mendukung dalam pembangunan di Kabupaten Malinau, khususnya pada Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kedua model tersebut memiliki kelebihan masing-masing walaupun pada kenyataannya dilapangan realisasi anggaran belum terlaksana dengan baik, dikarekan faktor-faktor penghambat yang menjadi dasar utama pelaksanaan dua program tersebut. Dikarenakan suatu program yang baik tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang di inginkan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya program tersebut. Terlebih kedua program alokasi dana yang secara spesifik berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Untuk mengetahui efektivitas dari dua model pengalokasian tersebut dan dapat berjalan efektif, maka peneliti menetapkan indikator-indikator efektivitas yang merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P (1989:47) yaitu Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output, Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

Keberhasilan Program

Keberhasilan program Alokasi Gerdema pada Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang dapat dilihat dari semangat kerja yang ditunjukkan perangkat desa, partisipasi masyarakat meningkat, kelembagaan yang ada di desa aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan pembangunan secara kontinyu berjalan baik, serta menurunnya angka kemiskinan di Desa Pulau Sapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah daerah melalui program gerakan desa membangun telah berhasil. Keberhasilan

program tersebut mampu mengerakkan potensi yang ada di Desa Pulau sapi. Seluruh elemen dilibatkan dalam pembangunan dan bergerak berdasarkan kemampuan masing-masing.

Proses Perencanaan

Setiap program pembangunan harus disertai dengan sistem dan mekanisme yang baik jika ingin berjalan dengan sukses. Demikian dengan Gerdema, ketika dilapangan peneliti mengkaji berdasarkan fakta dilapangan bahwa mekanisme atau sistem pelaksanaan, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan baik. Proses perencanaan dilakukan melalui tahap identifikasi masalah dari tahap identifikasi masalah untuk memastikan masalah pembangunan yang perlu ditindak lanjuti dengan perencanaan yang lebih konkret. Hasil penelitian menunjukkan mengenai peran serta masyarakat Desa Pulau sapi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pulau sapi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan melalui beberapa tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan perencanaan hasil observasi peneliti dilapangan yaitu :

- a. Pra-Musrenbangdes
- b. Musrenbangdes
- c. Musrenbangcam
- d. Musrenbang Kabupaten
- e. Pengawasan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tahapan proses perencanaan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Gerdema dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam pasal 62 :

- (1) Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT Bersih dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank BNI Cabang Malinau.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan RT Bersih langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
- (4) Mekanisme Penyaluran Dana Desa , Dana GERDEMA dan RT bersih mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme Penyaluran Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT bersih dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk proses pelaksanaan Gerdema, berdasarkan hasil penelitian menerangkan keterlibatan masyarakat Desa Pulau sapi yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang ada di Desa merupakan hasil dari gotong-royong masyarakat Desa Pulau sapi. Partisipasi merupakan nilai strategis dari suksesnya gerakan di desa. Kesadaran masyarakat untuk berbuat bersama-sama menangani persoalan dan penataan layanan kepentingan desa. Partisipasi juga mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri.

Proses Evaluasi

Pertanggungjawaban pengelolaan dana Gerdema merupakan suatu yang mutlak, harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan tidak lain, karena dana yang dikelola oleh desa merupakan dana yang bersumber dari APBD. Pengelolaan harus sesuai dengan ketentuan, dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan terhadap kedua model alokasi dana ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengawasan. Baik secara internal oleh inspektur maupun secara eksternal yang dilakukan oleh BPKP dan BPK.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa dalam hal yang berkaitan dengan proses evaluasi, peran masyarakat desa yang sangat besar dalam partisipasi setiap kegiatan gerdema, menjadikan setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam proses evaluasi.

Keberhasilan Sasaran

Setiap program memiliki target dan sasaran yang ingin dicapai. Demikian dengan dua model program pengalokasian dana Gerdema ini memiliki sasaran yang sama yang hendak dicapai yaitu pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Hasil dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sasaran program belum berjalan efektif, pembangunan fisik lebih diprioritaskan dan menjadi program utama dari GERDEMA dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik lebih dominan dan lebih banyak dilakukan di Desa Pulau sapi.

Selanjutnya mengenai pemberian bantuan berupa dana maupun pelatihan yang diberikan melalui GERDEMA pada bidang pemberdayaan masyarakat sudah dapat dikatakan cukup baik, namun seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kelanjutan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut khususnya masyarakat Desa Pulau Sapi. Sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh kedua model pengalokasian dana desa tersebut mampu berjalan secara efektif berdasarkan keinginan yang

diharapkan bersama. Hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa, oleh karena itu menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah dan pemerintah Desa Pulau sapi.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan belum adanya pemasukan dana dari PADes Pulau sapi. Pandangan peneliti seharusnya dengan dana yang diterima dari GERDAMA, Desa Pulau sapi sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana dari PADes. Dengan didukung dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang cukup besar, serta perubahan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat merupakan kunci keberhasilan Desa Pulau sapi untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan khususnya pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Hal ini tentu menjadi tugas bersama untuk mencapai sasaran program GERDEMA secara efektif

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program GERDEMA menjadi tolak ukur efektifitas pelaksanaannya dalam membangun desa di Desa Pulau sapi. Kepuasan ini dirasakan oleh para pembuat program dan yang merasakan langsung hasil nyata dari program tersebut dalam hal ini adalah masyarakat dan aparat desa di Desa Pulau sapi. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menjalankan program GERDEMA sejak tahun 2012. Banyak perubahan yang telah terjadi, respon masyarakat Desa Pulau Sapi khususnya sangat menyambut baik dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Hasil penelitian menjelaskan Kepuasan dari pelaksanaan program GERDEMA ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Desa Pulau Sapi, melainkan kepuasan tersendiri dirasakan oleh aparat desa setempat. Adanya bantuan operasional dan bantuan insentif menjadi nilai tambah semangat aparat desa dalam bekerja. Semangat kerja yang ditunjukkan oleh aparat Desa Pulau Sapi menunjukkan bahwa kedua model program pengalokasian dana ini membawa respon yang sangat positif.

Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa Kerjasama yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam membangun desa menunjukkan keberhasilan dari program tersebut. Keberhasilan program baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan berjalan baik jika memposisikan masyarakat selaku subjek pembangunan. Jika suatu program berjalan secara efektif maka akan memberikan nilai kepuasan yang dirasakan oleh pembuat dan pelaksana program tersebut. Kepuasan yang ditunjukkan bukan hanya merasakan kesenangan pribadi namun lebih jauh mengenai semangat gotong-royong yang ditunjukkan dan menjaga kelestarian dari pelaksanaan program tersebut. Serta partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya semakin tinggi.

Tingkat Input dan Output Program

Tingkat input dan output merupakan salah satu indikator program yang efektif. Banyaknya tingkat input program akan efektif apabila sesuai dengan pencapaian output program, adanya kesesuaian hasil dari input dan output. Pada GERDEMA inputnya adalah berupa usulan-usulan atau draft program pembangunan yang di usulkan oleh masyarakat dan besarnya pengalokasian dana yang diterima oleh Desa Pulau Sapi yang bersumber dari APBD dan APBN. Sedangkan output dari program GERDEMA adalah besarnya jumlah realisasi program dari usulan-usulan yang di ajukan oleh masyarakat.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa usulan-usulan program pembangunan dari masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa (RKDes) mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah usulan masyarakat disetujui oleh Pemerintah Desa Pulau Sapi. Dan usulan pemerintah daerah desa sendiri disetujui menjadi RKDes sebesar 20%. Usulan program pembangunan baik dari masyarakat dan pemerintah desa yang disetujui menjadi RKDes mencapai 100%. Pencapaian yang didapat oleh program GERDEMA karena menitikberatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Artinya adalah memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk mengatur segala urusan desanya.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa usulan program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat pada musrenbangdes tidak ada yang ditolak. Hanya saja ditangguhkan untuk kegiatan tahun berikutnya dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga program pembangunan yang didahulukan adalah program pembangunan yang menjadi prioritas utama di Desa Pulau Sapi. Dari fakta yang ada dilapangan peneliti ingin menyampaikan bahwa perlu adanya pemberian informasi dan keterangan dari aparat Desa Pulau Sapi kepada masyarakat agar mengetahui mekanisme usulan program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat tidak ada yang dibatalkan atau ditolak melainkan ditangguhkan. Sehingga tidak menjadi suatu polemik antara masyarakat dengan aparat Desa Pulau Sapi.

Tingkat Input dan Output Dana

Efektifitas pelaksanaan program tidak hanya ditinjau dari kesesuaian antara banyaknya usulan program dengan realisasinya. Pada kebijakan program pengalokasian dana GERDEMA dilihat juga melalui tingkat input dan output dananya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Alokasi Dana Gerdema

No	Alokasi Dana	Pagu Dana	Realisasi	Saldo
1.	Gerdema (APBD)	Rp.1.437.319.129,00	Rp.844.443.129,00	Rp.592.876.000,00

Berdasarkan tabel tersebut alokasi dana GERDEMA terlihat jumlah saldo akhir masih sangat besar. Hal ini bukan dikarekan Desa Pulau Sapi tidak mampu mengelola keuangan desa dengan baik, tapi permasalahan tersebut didasari adanya penundaan atau pemangkasan dana bagi GERDEMA.

Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menjelaskan bahwa dana yang ditransfer ke kas desa baik dana GERDEMA dan DD telah direalisasikan sesuai antara pendapatan dan belanja desa. Hanya saja masih terdapat kendala sehingga dana belum optimal secara keseluruhan pada tahun anggaran berjalan. Seperti adanya penundaan pencairan dana GERDEMA tahun 2016 sehingga ada beberapa rencana kegiatan desa ditunda pengerjaannya.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan efektifitas input dan output secara keseluruhan dapat dikatakan masih kurang efektif. Namun tentunya ada hal-hal prinsip yang harus dibenahi agar pelaksanaan GERDEMA dan DD berjalan lebih efektif lagi baik dari program ataupun *input* dan *output* dari dana GERDEMA dan DD di Desa Pulau Sapi.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Kebijakan Alokasi dana GERDEMA merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa dalam membangun Desa nya baik dari aspek ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pencapaian tujuan menyeluruh dari kedua model program kebijakan pengalokasian dana desa ini adalah adanya perubahan yang signifikan pembangunan desa dilihat dari terwujudnya proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terwujudnya penyelenggaraan pembangunan desa, dan terwujudnya proses penyelenggaraan pelayanan umum. Sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. Terwujudnya Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Proses penyelenggaraan desa merupakan indikator efektivitas pencapaian tujuan secara menyeluruh melalui berbagai akitivitas. Birokrasi desa yang berjalan dengan baik mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui GERDEMA dan DD Kabupaten Malinau terus bekerja keras agar penyelenggaraan kehidupan birokrasi desa dapat berjalan semakin baik. Tatanan terkecil birokrasi Pemerintah Desa Pulau sapi adalah Rukun Tetangga (RT).

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa terwujudnya proses penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai keberhasilan kinerja ini adalah terbangunnya kerjasama birokrasi yang dinamis, efisien, dan efektif pada jajaran pemerintahan desa yang menjadi cermin hakiki pemerintahan desa sebagai penyelenggara kepentingan rakyat yang di instruksikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Terwujudnya pembangunan di Desa Pulau Sapi melalui GERDEMA kini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pembangunan fisik secara terus menerus dilakukan di Desa Malinau Seberang baik pembangunan desa dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi yang diambil oleh peneliti saat melakukan observasi dilapangan. Kemampuan Pemerintah Desa Pulau Sapi beserta masyarakat untuk pengelolaan potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa. Perangkat Desa Pulau Sapi secara rutin memperkuat ekonomi masyarakat. Bentuk kegiatan dapat berupa fisik dan non fisik yang dilakukan melalui mekanisme partisipasi serta swadaya berbagai pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi selama ini di Desa Pulau Sapi harus dibarengi dengan kemampuan dalam pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur desa serta berbagai fasilitas lainnya agar tetap berdaya guna. Tidak hanya itu perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi hasil dari potensi masyarakat agar terus dapat menjadikan pendapatan tetap oleh masyarakat Desa Pulau Sapi.

3. Terwujudnya Proses Pelayanan

Terselenggaranya pelayanan umum kepada masyarakat Desa Pulau Sapi merupakan salah satu pencapaian yang menjadi tujuan pelaksanaan GERDEMA. Penyerahan urusan dari pemerintah kabupaten kepada desa ini merupakan prinsip yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Efektivitas pelaksanaan GERDEMA dalam membangun desa di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara di Desa Pulau Sapi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan lima indikator efektifitas yang dikemukakan oleh Campbel JP (1989:47). Dari kelima indikator tersebut tiga diantaranya berjalan secara efektif yaitu keberhasilan program, kepuasan program, dan pencapaian tujuan menyeluruh sedangkan dua indikator yaitu keberhasilan sasaran dan tingkat input dan output belum efektif. Berdasarkan keterangan tersebut Efektivitas Pelaksanaan GERDEMA dan DD Dalam Membangun Desa Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara di Desa Pulau Sapi sudah berjalan efektif, namun masih ada yang harus diperbaiki pada indikator keberhasilan dan tingkat input dan output agar kedua program tersebut mampu berjalan secara lebih efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan GERDEMA dalam membangun desa:

- a. Keberhasilan Program, hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan GERDEMA di Desa Pulau sapisemakin baik. Keterlibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi pada kegiatan musrenbangdes berjalan secara efektif. Tidak hanya itu keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di Desa Pulau sapi ikut berperan aktif mensukseskan pembangunan desa.
- b. Keberhasilan Sasaran, sasaran yang menjadi fokus dari GERDEMA (APBD) adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian dilapangan menunjukkan bahwa sasaran kedua program belum berjalan efektif. Pembangunan fisik lebih diprioritaskan menjadi lebih dominan, Alokasi GERDEMA sebesar 70% dan Alokasi DD sebesar 80% sedangkan program pemberdayaan masyarakat pada Alokasi GERDEMA sebesar 30%. Dari hasil penelitian belum ada perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih diprioritaskan baik Alokasi GERDEM.
- c. Kepuasan Program GERDEMA di Desa Pulau sapi sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Fakta dilapangan mengatakan seluruh penyelenggaraan pemerintah, pemangku kepentingan dan aparat Desa Pulau sapi serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda memberikan respon yang sangat positif terhadap pelaksanaan GERDEMA. Kepuasan ditunjukkan dari semangat gotong-royong dan menjaga serta memanfaatkan pembangunan dengan baik dan benar.
- d. Tingkat Input dan Output program berjalan secara baik, namun ditemukan permasalahan pada peruntukkan dan penempatan usulan pelaksanaan program GERDEMA menjadi tidak sesuai dengan usulan masyarakat. Masyarakat belum memahami perbedaan peruntukkan penggunaan anggaran GERDEMA dan anggaran DD. Pada Input dan Output anggaran berjalan secara baik, tapi belum efektif karena terjadi adalah pemangkasan anggaran alokasi GERDEMA yang berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan.
- e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh berdasarkan hasil penelitian pencapaian tujuan GERDEMA berjalan secara efektif. Proses penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa, serta pelayanan umum berjalan baik. Kerjasama komunikasi, dan kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Dengan semangat gotong royong, partisipasi aktif, dan pengawasan yang efektif.

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas pelaksanaan GERDEMA dalam membangun Desa adalah :

1. Diperlukan pengaturan mengenai kinerja aparat desa tentang tugas pokok dan fungsi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta lebih memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan desa.

2. Pengelolaan alokasi GERDEMA pada pelaksanaannya berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Desa perlu menyusun pedoman pertanggungjawaban anggaran dari sumber GERDEMA, sesuai pedoman pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBD.
4. Perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dan tim pelaksana pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaan GERDEMA berjalan lebih efektif.
5. Penulis berharap kepada peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi dalam bidang efektivitas pelaksanaan program model GERDEMA dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Malinau khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Campbel. 1989. *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan Sahat Simamora. Erlangga: Jakarta.
- Effendy. Khasan. 2008. *Otonomi Desa, Historis dan Kontekstual*. CV. Indra Prahasta: Bandung.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik*. PT. Reflika Aditama: Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara: Jakarta.